



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur/Makalah

- Agus Budi Susilo, (2006), *Perbuatan Hukum Publik yang Melanggar Hukum dapat Digugat ke Pengadilan Administrasi*, Ar-Ruzz, Yogyakarta.
- Agus Dwiyanto, (2003), *Reformasi; Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat studi kependudukan dan kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Alfitra Salam, dkk, (2006), *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, (2005), *Hukum Penanaman Modal*, Kencana, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, (1984), *Sistem Hukum Indonesia*, Remaja Karya, Bandung.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar, (1997), *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Bambang Yudoyono, (2003), *Otonomi Daerah; Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Em Zul Fajri, (tanpa tahun), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Diva Publisher, Yogyakarta.
- Hartono Hadisoeparto, (1998), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, edisi IV Liberty, Yogyakarta.
- HAW. Wijaya, (2005), *Penyelenggaraan Otonomi di Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I Wayan Sudirta, (2005), *Penuangan Kebijakan Daerah Dalam Peraturan Daerah*, Makalah disampaikan dalam Temu Konsultan Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda), Bali.
- Jimly Asshiddiqie, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi-Press, Jakarta.
- Maria SW. Sumardjono, (2006), *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mudrajat Kuncoro, (2005), *Menanti Reformasi Iklim Bisnis di Indonesia*, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, UNISIA.



- Muhammad Fauzan, (2006), *Hukum Pemerintahan Daerah*, UII-Press, Yogyakarta.
- Murtir Jeddawi, (2005), *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah; Kajian beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*, UII-Press, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, (2005), *Otonomi Daerah : Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pheni Chalid, (2005), *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, (2005), *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, UGM-Press, Yogyakarta.
- Pratikno, dkk, (2004), *Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah*, Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta.
- Ridwan. HR, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Press, Jakarta.
- Rai Wijaya, (2000), *Penanaman Modal*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- S.F. Marbun, (1997), *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Salim HS dan Budi Sutrisno, (2008), *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Sukanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, (2006), *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugeng Istanto, (tanpa tahun), *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Magister Hukum UGM, Yogyakarta.
- Suhendro, (2005), *Hukum Investasi di Era Otonomi Daerah*, Gita Nagari, Yogyakarta.
- Syaukani, dkk, (2002), *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan/Produk Hukum Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintrahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Antar Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi.
- Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
- Keputusan Kepala BKPM Nomor 57 Tahun 2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Keputusan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 44 Tahun 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan pelayanan Perizinan dan Investasi Kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan investasi Kabupaten Purbalingga.



Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor pelayanan Perizinan dan Investasi.

Keputusan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 503/148 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Perizinan.

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusan Retribusi Perizinan di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembebasan Retribusi Izin Gangguan (selanjutnya disebut Perbup No. 53 Tahun 2007), Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan Bagi Usaha Kecil (Mikro).

Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Keputusan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 581/102 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Monitoring Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Kecil (UMK).

Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Program Perkuatan Modal Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi (PM-LKMK).

Keputusan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 500/23 Tahun 2007 tentang Pembentukan *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP)/Forum Pengembangan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja.

Surat Keputusan Bersama Bupati Kabupaten Banjarnegara Nomor 130A Tahun 2003, Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 4 tahun 2003, Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 36 Tahun 2003, Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 48 Tahun 2003, dan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama *Regional Management* yang diorientasikan pada *Regional Marketing*.

C. Rujukan Internet

www.kompas.com.

www.purbalinggakab.go.id.